

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

2.1 Tinjauan Teori

2.1.1 Teori Pembangunan Manusia

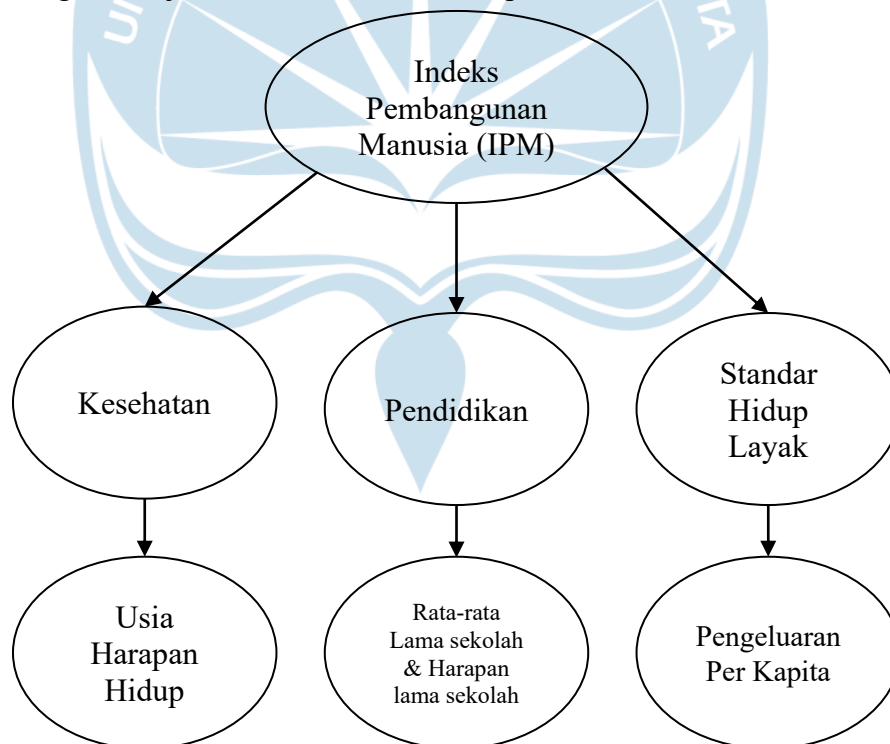
Indarti (2017), menjelaskan pembangunan manusia menurut Amartya Sen dibagi menjadi tiga yang pertama adalah kecukupan, yang meliputi kecukupan atas kebutuhan-kebutuhan dasar. Kedua adalah harga diri, yang mencakup dorongan dari diri sendiri untuk maju, menghargai diri sendiri, jati diri sebagai negara dan masyarakat timur dan lain sebagainya. Ketiga adalah kebebasan dari sikap menghambat. Komponen kebebasan manusia melingkupi segenap komponen antara lain kebebasan politik, keamanan diri pribadi, kepastian hukum, kemerdekaan berekspresi, partisipasi politik dan pemerataan kesempatan. Jadi pembangunan tanpa diiringi dan mempertimbangkan komponen kebebasan, hanyalah akan menjadi suatu bencana, karena hal tersebut akan menciptakan perubahan sosial yang tidak diharapkan bahkan menghambat proses pembangunan itu sendiri.

Teori pembangunan manusia Amartya Sen sangat relevan dengan penelitian ini yang menggunakan Indeks Pembangunan Manusia (IPM) sebagai variabel dependen, karena IPM mencerminkan kemampuan dasar manusia dalam hal kesehatan, pendidikan, dan standar hidup. Sen menekankan bahwa pembangunan sejati adalah perluasan kebebasan individu untuk menjalani kehidupan yang bernilai, bukan sekadar pertumbuhan ekonomi. Oleh karena itu, IPM menjadi

indikator yang tepat untuk mengukur keberhasilan pembangunan dari perspektif kualitas hidup manusia, sebagaimana digarisbawahi dalam pendekatan capability.

2.1.2 Konsep dan Komponen IPM

Indeks Pembangunan Manusia (IPM) menurut BPS adalah indikator komposit yang digunakan untuk mengukur keberhasilan pembangunan manusia di suatu wilayah secara lebih menyeluruh. IPM mencerminkan bagaimana penduduk dapat mengakses hasil pembangunan dalam tiga dimensi dasar: umur panjang dan hidup sehat, pengetahuan, serta standar hidup layak. IPM menjadi alat penting dalam melihat efektivitas kebijakan pembangunan, sekaligus sebagai indikator perbandingan kesejahteraan antardaerah maupun antarwaktu.



Sumber: BPS Visualisasi (2025)

Gambar 2. 1
Struktur Komponen IPM

Menurut BPS (2025), seperti pada gambar 2.1, IPM terdiri dari tiga komponen utama yang pertama kesehatan, yang diukur berdasarkan usia harapan hidup saat lahir. Kedua pendidikan, yang diukur melalui dua indikator yaitu rata-rata lama sekolah untuk penduduk usia 25 tahun ke atas dan harapan lama sekolah untuk anak usia 7 tahun serta yang terakhir standar hidup layak, yang diukur menggunakan pengeluaran per kapita yang disesuaikan. Ketiga komponen ini mencerminkan dimensi esensial dalam pembangunan manusia yang berkelanjutan dan inklusif.

Penggunaan IPM memberikan sejumlah manfaat yang signifikan menurut Soleha (2016) dalam Azfirmawarman *et al* 2023). Di antaranya adalah yang pertama memberikan pemahaman kepada para pemangku kepentingan bahwa pembangunan manusia harus menjadi prioritas utama, bukan hanya pertumbuhan ekonomi semata, selain itu IPM memunculkan pertanyaan kritis terhadap kebijakan negara, terutama ketika negara-negara dengan tingkat pendapatan per kapita yang sama memiliki nilai IPM yang berbeda dan IPM juga mengungkapkan kesenjangan antarwilayah, antarkelompok sosial ekonomi, serta antaridentitas seperti gender, etnis, dan komunitas tertentu. Terbukanya perbedaan-perbedaan ini mendorong diskusi dan perundingan guna mengidentifikasi akar masalah dan mencari solusi yang tepat.

2.1.3 Teori Pertumbuhan Ekonomi

Pertumbuhan ekonomi, yang merupakan proses peningkatan output secara berkelanjutan dari waktu ke waktu, menjadi salah satu indikator utama dalam menilai keberhasilan pembangunan suatu negara (Todaro 2005). Untuk mengukur

pertumbuhan ekonomi di tingkat regional, digunakan data Produk Domestik Regional Bruto (PDRB), yang merupakan nilai total dari barang dan jasa akhir yang dihasilkan oleh kegiatan ekonomi di suatu wilayah dalam periode tertentu. Dengan demikian, PDRB berfungsi sebagai indikator untuk menilai tingkat aktivitas ekonomi di daerah tersebut (Mahrani dan Isnawati 2014) Dalam konteks penelitian ini, pertumbuhan ekonomi regional yang diukur melalui PDRB sebagai variabel independen memiliki keterkaitan langsung dengan Indeks Pembangunan Manusia (IPM) sebagai variabel dependen. Berikut rumus dari pertumbuhan ekonomi regional:

$$\text{Pertumbuhan Ekonomi} = \frac{PDRB_t - PDRB_{t-1}}{PDRB_{t-1}} \times 100\%$$

Dimana:

PDRB = Produk Domestik Regional Bruto

t = tahun berjalan

t – 1 = tahun sebelumnya

Teori pertumbuhan ekonomi menyatakan bahwa peningkatan output dari waktu ke waktu mencerminkan keberhasilan pembangunan suatu wilayah. Ketika ekonomi suatu daerah tumbuh, secara teoritis akan terjadi peningkatan pendapatan masyarakat, perluasan kesempatan kerja, serta peningkatan kapasitas fiskal pemerintah daerah untuk membiayai sektor-sektor vital seperti pendidikan dan kesehatan. Hal ini sejalan dengan dimensi IPM yang mencakup kesehatan, pendidikan, dan standar hidup layak. Oleh karena itu, semakin tinggi pertumbuhan ekonomi suatu daerah, maka secara umum diharapkan mampu mendorong

peningkatan kualitas hidup masyarakat, yang tercermin dalam nilai IPM yang lebih tinggi.

2.1.4 Teori Kemiskinan

Kemiskinan merupakan dimana kondisi ketidakmampuan seseorang atau kelompok untuk memenuhi kebutuhan dasar hidup yang layak seperti pangan, sandang, papan, kesehatan, pendidikan, dan akses terhadap sumber daya lainnya (BPS 2025). Lebih spesifik orang yang tergolong miskin adalah orang yang pendapatannya di bawah garis kemiskinan. Kemiskinan absolut dan kemiskinan relatif merupakan dua kategori yang digunakan untuk mengidentifikasi tingkat kesulitan ekonomi yang berbeda. Kemiskinan absolut mengacu pada kondisi di mana sebagian besar masyarakat tidak mampu memenuhi kebutuhan dasar seperti pangan, sandang, dan papan. Sementara itu, kemiskinan relatif timbul akibat ketimpangan ekonomi yang menyebabkan perbedaan kesejahteraan antar kelompok dalam masyarakat (Todaro dan Smith 2011)

Teori tentang kemiskinan absolut dan relatif memiliki relevansi langsung dengan penelitian yang menggunakan kemiskinan sebagai variabel independen dan Indeks Pembangunan Manusia (IPM) sebagai variabel dependen. Kemiskinan, baik dalam bentuk absolut maupun relatif, mencerminkan keterbatasan akses masyarakat terhadap kebutuhan dasar seperti pendidikan, kesehatan, dan penghidupan layak yang merupakan tiga dimensi utama dalam IPM. Dalam konteks ini, semakin tinggi tingkat kemiskinan di suatu daerah, maka kemungkinan besar capaian IPM akan lebih rendah, karena masyarakat yang hidup dalam kemiskinan cenderung memiliki keterbatasan dalam mengakses layanan kesehatan, pendidikan, dan sumber daya

ekonomi. Dengan demikian, hubungan antara kemiskinan dan IPM dapat dijelaskan secara teoritis sebagai pengaruh negatif kemiskinan terhadap kualitas pembangunan manusia.

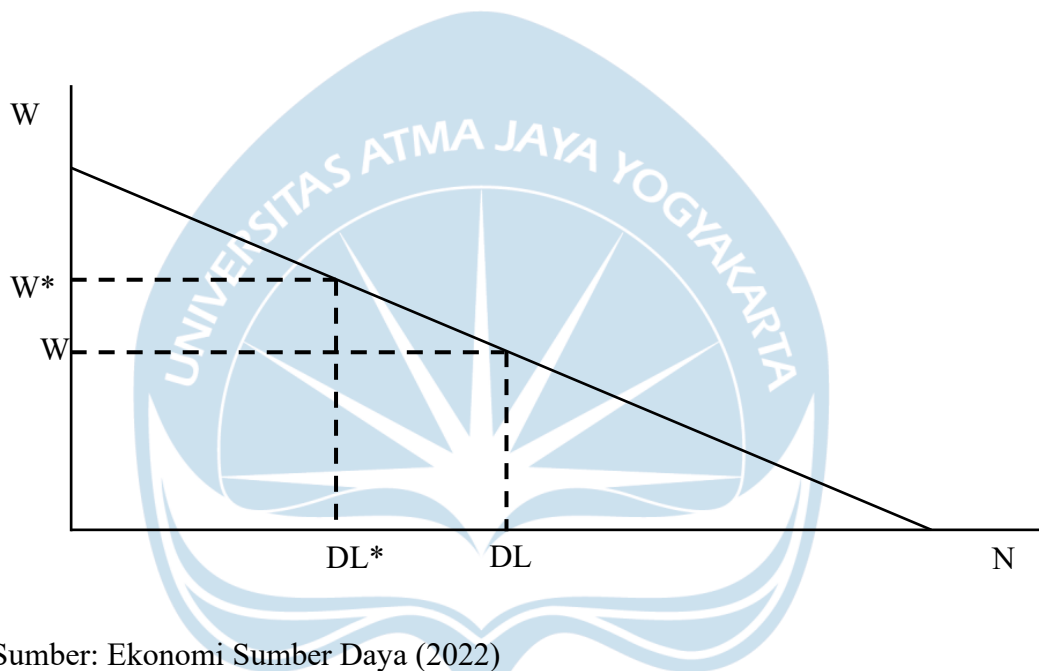
2.1.5 Teori Modal Manusia

Becker (1975) menekankan bahwa modal manusia merupakan faktor penting yang dapat mendorong pertumbuhan ekonomi. Becker menjelaskan bahwa negara-negara yang minim sumber daya alam namun memiliki kualitas sumber daya manusia yang tinggi justru mampu tumbuh lebih cepat dan menjadi negara maju, dibandingkan negara-negara yang kaya akan sumber daya alam namun kurang dalam pengembangan *human capital*.

Teori *human capital* yang dikemukakan oleh Becker (1993) sangat relevan dengan penelitian yang menggunakan rata-rata lama sekolah sebagai variabel independen dan Indeks Pembangunan Manusia (IPM) sebagai variabel dependen. Becker menjelaskan bahwa kualitas sumber daya manusia, yang tercermin melalui pendidikan, merupakan kunci utama dalam mendorong pertumbuhan dan pembangunan, bahkan lebih penting daripada kekayaan sumber daya alam. Dalam konteks ini, rata-rata lama sekolah menjadi salah satu indikator utama dalam mengukur tingkat pendidikan masyarakat, yang juga merupakan salah satu dimensi dalam IPM. Semakin tinggi rata-rata lama sekolah, semakin besar peluang individu untuk meningkatkan kualitas hidupnya melalui akses pekerjaan yang lebih baik, penghasilan yang lebih tinggi, dan partisipasi aktif dalam kehidupan sosial. Oleh karena itu, peningkatan rata-rata lama sekolah secara teoritis akan berdampak positif terhadap peningkatan IPM sebagai ukuran kualitas pembangunan manusia.

2.1.6 Teori Pasar Tenaga Kerja

Pasar tenaga kerja merupakan tempat terjadinya interaksi antara permintaan tenaga kerja dari sektor swasta maupun pemerintah dengan jumlah tenaga kerja yang tersedia. Interaksi ini turut memengaruhi penetapan tingkat upah yang diterima oleh tenaga kerja (Hijriah dan Adiba 2019).



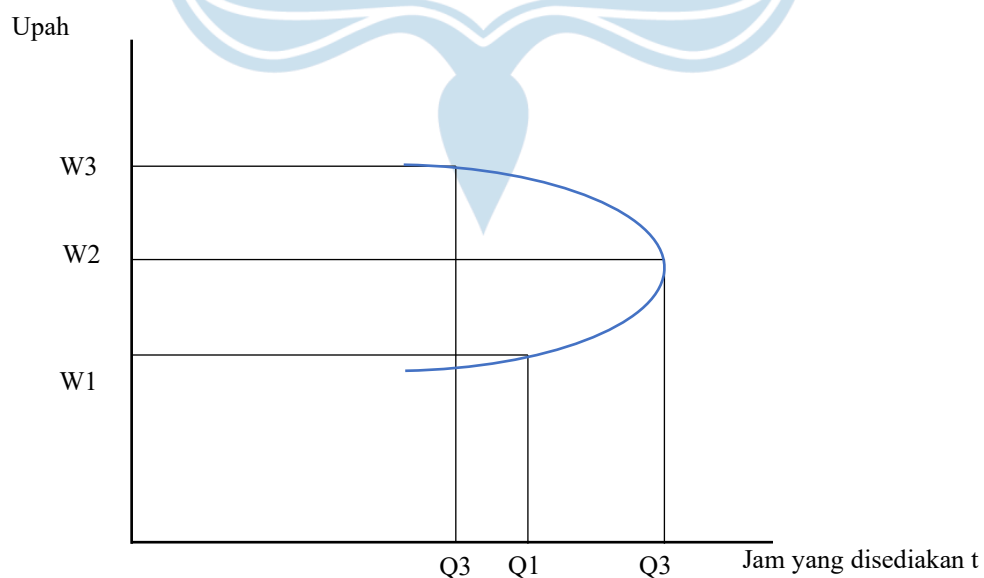
Sumber: Ekonomi Sumber Daya (2022)

Gambar 2. 2
Kurva Permintaan Tenaga Kerja

Gambar 2.2 di atas menunjukkan kurva permintaan tenaga kerja, yang menggambarkan respons jumlah tenaga kerja yang diminta oleh perusahaan terhadap perubahan tingkat upah, dengan asumsi bahwa jumlah modal tetap. Kurva ini memiliki kemiringan negatif dan mencerminkan nilai yang diberikan perusahaan terhadap produk marginal tenaga kerja, atau yang dikenal sebagai value marginal product (VMP). Dalam konteks ketenagakerjaan, permintaan tenaga kerja merujuk pada hubungan antara tingkat upah dan jumlah pekerja yang ingin direkrut oleh

pengusaha. Dengan demikian, permintaan tenaga kerja dapat diartikan sebagai jumlah pekerja yang bersedia dipekerjakan oleh pengusaha pada berbagai tingkat upah selama periode waktu tertentu.

Kurva penawaran tenaga kerja pada Gambar 2.3 menggambarkan jumlah jam kerja yang bersedia diberikan oleh pekerja pada berbagai tingkat upah. Ketika upah berada di atas tingkat reservasi, kurva ini awalnya memiliki kemiringan positif, yang berarti semakin tinggi upah, semakin banyak jam kerja yang ditawarkan. Namun, pada titik tertentu, ketika tingkat kesejahteraan pekerja meningkat atau mereka memiliki keterampilan lebih tinggi, jumlah jam kerja yang ditawarkan justru menurun meskipun upah naik. Hal ini menyebabkan kemiringan kurva menjadi negatif dan menghasilkan bentuk kurva penawaran tenaga kerja yang melengkung ke belakang, atau dikenal dengan istilah *backward-bending labor supply curve*.



Sumber: Ekonomi Sumber Daya Manusia (2022)

Gambar 2. 3
Kurva Tingkat Upah

Teori tentang pasar tenaga kerja yang menekankan interaksi antara permintaan dan penawaran tenaga kerja sangat berkaitan dengan penelitian yang menggunakan tingkat pengangguran terbuka sebagai variabel independen dan IPM sebagai variabel dependen. Tingginya tingkat pengangguran terbuka mencerminkan ketidakseimbangan dalam pasar tenaga kerja, di mana penawaran tenaga kerja melebihi permintaan. Hal ini dapat berdampak negatif terhadap pembangunan manusia karena individu yang menganggur cenderung memiliki akses terbatas terhadap pendapatan, layanan kesehatan, dan pendidikan—tiga dimensi utama dalam IPM. Oleh karena itu, pengangguran yang tinggi dapat menurunkan kualitas hidup masyarakat dan menghambat peningkatan IPM. Sebaliknya, pasar tenaga kerja yang seimbang dan tingkat pengangguran yang rendah berpotensi mendorong perbaikan kesejahteraan dan peningkatan pembangunan manusia secara menyeluruh.

2.2 Studi Terkait

Indiati *et al.* (2024) dalam penelitiannya yang berjudul “Pengaruh Kemiskinan Dan Pengangguran Terhadap IPM Di Kabupaten Jombang” menggunakan variabel yang sama yaitu kemiskinan dan pengangguran. Data yang dilakukan dalam penelitian ini menggunakan data sekunder yang dan diperoleh melalui website BPS Kabupaten Jombang dengan data time series 2013-2022. Metode penelitian yang digunakan adalah kuantitatif dan menggunakan Analisis Regresi Linier Berganda dengan model Ordinary Least Square (OLS). Hasil dari penelitian tersebut menunjukkan bahwa kemiskinan dan pengangguran berpengaruh signifikan terhadap IPM.

Penelitian yang dilakukan oleh Irawan dan Akbar (2022), menggunakan variabel yang sama dengan penelitian ini yaitu pertumbuhan ekonomi dalam penelitiannya yang berjudul “Pengaruh Pertumbuhan Ekonomi Terhadap Indeks Pembangunan Manusia Di Provinsi Sumatera Selatan Tahun 2016-2020”. Penelitian tersebut menggunakan data sekunder yang bersumber pada laporan Badan Pusat Statistik (BPS) khususnya data tahun 2016-2020. Penelitian tersebut juga menggunakan analisis data panel. Hasil dari penelitian tersebut menemukan bahwa pertumbuhan ekonomi regional berpengaruh positif dan signifikan terhadap IPM.

Arif *et al.* (2023) dalam “Pengaruh Angka Harapan Hidup saat lahir (AHH), Harapan Lama Sekolah (HLS) dan Rata-rata Lama Sekolah (RLS) terhadap Indeks Pembangunan Manusia di Provinsi Jambi” menggunakan variabel yang sama dengan penelitian ini yaitu RLS. Data yang diambil adalah data diambil pada web BPS pada 11 kabupaten/kota di Provinsi Jambi. Angka Harapan Hidup memiliki kemampuan untuk memengaruhi Indeks Pembangunan Manusia secara langsung dan mandiri, sedangkan Harapan Lama Sekolah dan Rata-rata Lama Sekolah tidak dapat memberikan pengaruh terhadap IPM secara terpisah.

Nurinsana dan Sudirman (2024) melakukan penelitian dengan judul “Pengaruh Tingkat Pengangguran Terbuka, Tingkat Inflasi dan Investasi Terhadap Indeks Pembangunan Manusia (IPM) dan Kemiskinan Di Provinsi Sulawesi Selatan”. Penelitian ini menggunakan pendekatan kuantitatif dengan data sekunder berupa data time series yang dikumpulkan dari tahun 2006 hingga 2020. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pengangguran, inflasi, dan investasi tidak

berpengaruh signifikan terhadap IPM. Sementara itu, pengangguran dan inflasi berpengaruh positif signifikan terhadap kemiskinan, investasi berpengaruh negatif signifikan terhadap kemiskinan, dan IPM tidak berpengaruh signifikan terhadap kemiskinan.

